

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nepal adalah negara yang mempunyai kondisi geografis dan keragaman budaya luar biasa. Keragaman budaya dari negara yang berbentuk Monarki Konstitusional tersebut tercermin pada Pasal 4 Konstitusi 1991, yang mengatakan bahwa Nepal adalah negara yang multi-etnik, multikultural dan multi-linguistik. Namun pengakuan oleh konstitusi tersebut sama sekali tidak menjadi sebuah realitas politik dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman budaya masyarakat kemudian menjadi sebuah isu yang "dilawan" oleh kebijakan yang ada. Misalnya, Pemerintah Kerajaan Nepal memberlakukan stratifikasi sosial melalui sistem kasta, menjadikan bahasa Nepal (khas Nepali) sebagai satu-satunya bahasa resmi, dan Hindu dijadikan satu-satunya agama resmi.

Dampak dari praktek tersebut adalah meluasnya diskriminasi etnik, kasta dan gender, yang selanjutnya menghancurkan identitas budaya komunitas-komunitas asli. Hal ini tentu dapat dilihat sebagai bentuk hilangnya atau tidak dioptimalkannya potensi modal sosial masyarakat adat akibat hancurnya bahasa dan agama-agama asli mereka.

Ada 59 komunitas asli (dalam bahasa Nepal: Janajati) yang sudah diakui dan populasi mereka sekitar 37.2% dari 23.4 juta penduduk Nepal. Komunitas-

komunitas asli ini berasal dari beberapa kelompok suku pengembara, masyarakat adat sekitar hutan dan petani. Dari komposisi populasi tersebut, berdasarkan sensus terakhir dan merujuk pada hasil survei standar hidup, menunjukkan kenyataan bahwa komunitas asli tersebut sebagian besar merupakan kelompok masyarakat miskin, rentan terhadap marginalisasi dan terlantar.

Hingga 1990, Nepal adalah sebuah monarki absolut berjalan di bawah kontrol eksekutif dari Raja. Raja Birendra pada tahun 1990 sepakat untuk mereformasi politik dengan menciptakan monarki konstitusional dengan Raja sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Parlemen Nepal berbentuk bilameral yang terdiri dari DPR dan Dewan Nasional. DPR terdiri dari 205 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat. Dewan Nasional memiliki 60 anggota, 10 dicalonkan oleh Raja, 35 dipilih oleh DPR dan sisanya 15 dipilih oleh suatu pemilihan perguruan tinggi yang terdiri dari kursi dari desa dan kota. Ketika parlemen baru berumur lima tahun, parlemen tadi dibubarkan oleh Raja.

Eksekutif terdiri Raja dan Dewan Menteri / Kabinet dan pemimpin partai mayoritas atau koalisi maksimum diangkat sebagai Perdana Menteri. Kabinet yang diangkat oleh Raja merupakan rekomendasi dari Perdana Menteri. Pemerintah di Nepal telah cenderung sangat tidak stabil, tidak ada pemerintah yang bertahan selama lebih dari dua tahun sejak 1991, baik melalui *internal collapse* atau pembubaran parlemen oleh Raja. Pada pertengahan 1994,

parlemen dibubarkan akibat perselisihan di dalam Partai Kongres Nepal. Pemilihan umum yang diselenggarakan 15 November 1994, tidak ada pihak yang mayoritas dan menyebabkan beberapa tahun pemerintahan menjadi tidak stabil. Pada pemilihan umum Mei 1999, Partai Kongres Nepal memenangi pemilu dan sekali lagi memimpin pemerintah. Sejak Pemilu 1999 ada tiga pemimpin Partai Kongres Nepal yang menjadi Perdana Menteri yakni: KP Bhattarai (31 Mei 1999 - 17 Maret 2000), Girija Prasad Koirala (20 Maret 2000 - 19 Juli 2001), dan Sher Bahadur Deuba (23 Juli 2001 -2003).

Pada bulan Februari 1996, Partai Komunis Nepal (Maoist) melakukan pemberontakan di lebih dari 50% propinsi dan 75% distrik. Sekitar 11.000 polisi, dan masyarakat sipil telah terbunuh sejak konflik tahun 1996. Pada bulan Juli 2001 Perdana Menteri Deuba mengumumkan gencatan senjata, dimana Maoist berjanji untuk mematuhi, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencari solusi negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Meskipun Maoist menghasut intimidasi dan pemerasan terus, yang ada pembunuhan besar sejak gencatan senjata diumumkan. Pertemuan Pemerintah dan Maoists diselenggarakan pada bulan Agustus dan September 2001.

Pada tanggal 1 Februari 2005 Raja Gyanendra membubarkan Parlemen, kemudian dia menunjuk dirinya sendiri menjadi kepala pemerintahan Raja berpendapat bahwa politisi sipil tidak layak untuk menangani pemberontakan Maoist. Para pemimpin oposisi lainnya melarikan diri ke India dan menetap disana. PBB sebagai respons atas peristiwa di Nepal,

menyelenggarakan program pemantauan di tahun 2005 untuk menilai dan memperhatikan situasi hak asasi manusia yang ada¹. Jika dilihat dari proses tersebut bahwa kekuasaan raja menjadi mutlak yang dalam sistem pemerintahan Nepal menjadi kembali kesistem Monarkhi Absolut, dimana raja berkuasa sepenuhnya membubarkan parlemen.

Pada tanggal 22 November 2005, Tujuh Partai Aliansi (SPA) dari pihak parlemen dan Partai Komunis di Nepal (Maoist) sepakat untuk membuat perdamaian di nepal dan membuat 12 poin *Memorandum Of Understanding* (MOU) untuk perdamaian dan demokrasi. SPA kemudian melakukan sebuah gerakan protes, dan didukung oleh Partai Komunis Nepal (Maoist). Ini yang menyebabkan pemberontakan di seluruh negeri yang dimulai pada bulan April 2006. Semua kekuatan politik termasuk masyarakat sipil dan organisasi profesi dan LSM. Hal ini mengakibatkan demonstrasi besar-besaran dan menuntut Raja Gyanendra untuk turun karena bersifat otokratis.

21 April 2006, Raja Gyanendra menyatakan bahwa kekuasaan akan dikembalikan kepada masyarakat. Hal ini memiliki sedikit efek pada rakyat yang terus memenuhi jalan-jalan Kathmandu dan kota-kota lainnya. Akhirnya Raja Gyanendra mengumumkan kembali hak-hak DPR, yang merupakan salah satu tuntutan utama dari SPA. Pada tanggal 19 Juli 2006, Perdana Menteri GP Koirala, mengirim surat ke PBB mengumumkan niat dari pemerintah untuk

¹ Aktivitas Nepal, OHCHR.

melaksanakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante pada April 2007.

Tanggal 23 Desember 2007, dibuat kesepakatan bahwa sistem monarki akan dihapuskan dan menjadi negara republik federal dengan Perdana Menteri menjadi kepala negara.² Jika situasi dan kondisi politik diprediksi stabil sampai April 2008 maka pemilu akan dilaksanakan. Partai Komunis Nepal (Maoist) menjadi partai terbesar di tengah-tengah suasana ketakutan dan intimidasi dari semua pihak³. Tuntutan rakyat dan kelompok Maoist sebagai partai terbesar di Nepal saat itu sangat beralasan, kekuasaan raja yang mutlak dan menyatakan kembali ke Monarki Absolut dan akan membentuk Negara berbentuk Republik, dalam sistem pemerintahan Nepal menjadi tidak jelas. Disamping itu terjadinya penangkapan politisi-politisi Nepal oleh pemerintahan Gyanendra juga menyulut kemarahan para aktivis dan rakyat Nepal, maka terjadilah gelombang besar untuk mendirikan dan membentuk Negara Nepal sebagai Negara Republik. Perubahan Negara Monarki menjadi Republik itu disambut sebagian warga Nepal dengan suka cita. Kenyataannya tak dipungkiri bila kelompok pemberontak Maoist, yang oleh pemerintah George W Bush dikategorikan sebagai organisasi teroris, itu kini sudah masuk ke wilayah pengambilan keputusan. Sebagian rakyat Nepal dari 26 juta penduduk tersebut telah memberikan kepercayaan pada wakil-wakil mereka yang tergabung dalam

² Gurubacharya, Binaj (2007-12-24). "Nepal akan menghapus monarki". [Http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1698161,00.Html](http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1698161,00.Html). diakses 6 April 2009.

³ [Http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=11057207&fsrc=nwl](http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=11057207&fsrc=nwl).

partai Moist. Perubahan Negara Monarkhi ke Republik pun mendapat sambutan hangat warganya. Dengan penegasan itu, parlemaen mendesak penguasa kerajaan yang masih bertahan raja Gyanendra untuk segera mengosongkan istana Merah Muda di Kathmandu. Istana tersebut akan disejajarkan dengan menjadikanya musium.

Republik Federal Nepal didirikan pada Mei 2008, yang mengakhiri 240 tahun pemerintah kerajaan di Nepal. Pemerintah mengumumkan hari libur selama tiga hari, (28 Mei - 30 Mei), untuk merayakan Negara menjadi Republik Federal.⁴

Pada bulan Mei 2008 dilaksanakan pemilu pertama yang demokratis dan menjadikan Partai Komunis Nepal (Maoist) menjadi pihak yang memenangi konstituante, yang akan memerintah untuk jangka waktu dua tahun. Rakyat Nepal merayakan era baru sebagai Negara Republik termuda di dunia. Warga beramai-ramai turun ke jalan-jalan di Kathmandu untuk merayakan hari bersejarah itu. Mereka bernyanyi-nyanyi, menari dan bersiul-siul gembira. Nepal akhirnya menghapus sistem kerajaan yang telah dianut Negara miskin itu selama 240 tahun. Raja Gayendra dan seluruh keluarganya diberi waktu 15 hari untuk meninggalkan istana.⁵ Dalam sidang majelis konstitusi Nepal disetujui untuk menghapuskan sistem Kerajaan dan menggantinya menjadi Negara Republik. Resolusi itu disetujui oleh 560 anggota majelis. Hanya empat suara

⁴ "http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Nepal"

⁵ <http://ad.detik.com/link/peristiwa/prs-zyrex012008>.

yang menentang. "Semua keistimewaan yang dinikmati Raja dan keluarga kerajaan secara otomatis akan berakhir," demikian statemen majelis terpilih Nepal.

Resolusi ini merupakan kemenangan bagi kelompok gerilyawan Maoist yang telah lama memperjuangkan penghapusan monarki. Pemimpin Maoist, Prachanda kini menjadi orang paling kuat di Nepal. Pria itu akan segera memimpin pemerintahan baru Nepal. Para pendukung Maoist menyambut gembira era baru ini.

Setelah beberapa tahun mengalami perang saudara, proses perdamaian Nepal akan mencapai klimaksnya pada 10 April 2008, Nepal menggelar Pemilu yang mungkin akan menjadi pintu bagi berakhirnya sistem kerajaan di Himalaya itu. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat atau 08.15 WIB dan berakhir pukul 18.15 WIB. Namun hasil Pemilu untuk memilih 601 anggota Majelis Nasional ini baru bisa diketahui 3 minggu kemudian.⁶

Pemilu ini menjadi penentu masa depan kerajaan karena majelis yang dihasilkan memiliki mandat untuk menghapus sistem kerajaan dan menulis ulang konstitusi. Inilah Pemilu yang telah lama dinanti pemberontak Maois setelah mengorbankan 13 ribu orang tewas. "Inilah saatnya menggantikan pikiran dan nilai feodalistis dan korup dengan sebuah pikiran republikan," kata pemimpin pemberontak yang kharismatik, Prachanda, mengomentari Pemilu

⁶ <http://ad.detik.com/link/peristiwa/prs-zyrex012008>.

ini, Prachanda adalah seorang guru sekolah yang berubah jadi pemimpin revolusioner itu juga meminta rakyat untuk menahan diri, meski beberapa pendukungnya telah ditembak mati oleh polisi. Kelompok Maois ini tetap diawasi ketat, karena banyak pendukungnya kesulitan untuk hidup dalam situasi damai setelah bertahun-tahun ikut perang gerilya.

Pemilu ini diawasi PBB, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter bahkan telah berada di Ibukota Nepal, Kathmandu, mengawasi langsung Pemilu ini. Komisi Pemilu Nepal percaya diri pemilihan akan berlangsung lancar. Aparat keamanan telah disebar ke seluruh penjuru negeri mengawasi 18 juta orang yang ikut memilih.

Partai-partai utama Nepal yakni Partai Kongres Nepal dan Partai Komunis Nepal diduga akan meraih kursi terbanyak dalam pemilihan ini. Pertanyaan besar adalah, apakah kelompok Maois akan mendapat suara cukup dalam Pemilu ini sehingga tetap percaya dengan demokrasi.

Sejarah baru terukir di Negeri tetangga India, Nepal. Mulai hari ini, Negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu ini mengubah sistem pemerintahannya dari Kerajaan Ke Republik.⁷ Pada April 2008 lalu, pemilu digelar dan diputuskan perubahan sistem pemerintahan ini. Optimisme muncul, meskipun para penentang juga tidak kalah banyak.

⁷ <http://ad.detik.com/link/peristiwa/prs-zyrex012008.ad>

Berakhirnya sistem kerajaan yang sudah 239 tahun dianut Nepal, merupakan bentuk kompromi dengan pemberontak Maoist, yang kini justru menjadi partai terbesar di Nepal dan mempunyai wakil mayoritas di parlemen dari 601 total jumlah anggota parlemen. Kondisi keamanan di Nepal saat ini mulai mengkhawatirkan, setelah terjadi ledakan di beberapa tempat. Diduga, pihak pendukung mantan Raja Gyanendra yang melakukan aksi ini. Mereka pun mengancam akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak perubahan sistem pemerintahan ini.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana proses pergantian sistem politik dan pemerintahan di Nepal ()?”

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam melakukan atau membuat karya ilmiah ini pada esensinya bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses pergantian politik dan pemerintahan di Nepal.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu bisa terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Penggunaan teori selain untuk melakukan eksplanasi juga menjadi dasar bagi sebuah prediksi. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Nepal, penulis akan menggunakan dasar teori sebagai acuan. Kerangka dasar teori ini dipakai sebagai pedoman untuk mempermudah kegiatan penelitian dan alur pemikiran,

sehingga akan dicapai hasil yang runtut dan tepat. Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka landasan teori yang akan dipakai penulis adalah:

1. Transisi Menuju Demokrasi

Secara teoretis, dapat dikatakan bahwa dalam rezim demokrasi, pola interaksi antara *state* dan *society* sangat dinamis. Atau dengan kata lain, terjadi suatu interaksi dua arah antara *state* dan *society*, baik pada proses pengambilan keputusan (*policy making*), maupun pada tahap implementasi kebijakan (*policy implementation*). Sehingga berbagai keputusan yang diambil oleh negara, secara prinsipal, merupakan persenyawaan antara tuntutan masyarakat (*society*) dan kepentingan pihak *state* itu sendiri. Jadi, tegasnya, walaupun negara secara legal formal memiliki otoritas untuk menjatuhkan palu akhir atas berbagai keputusan yang diambil, namun perannya dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri lebih sebagai mediator atas kompleksitas dan perbedaan kepentingan dari kalangan masyarakat.⁸

Praktik desentralisasi dalam rezim demokrasi, tentunya, memiliki hubungan interkoneksi dengan karakteristik pola interaksi *state-society* seperti telah dijelaskan di atas. Dengan kata lain, sebagai bagian dari kebijakan nasional, maka baik perumusan konsep maupun implementasi kebijakan desentralisasi, didasarkan pada interaksi dua arah antara *state* dan *society*. Sehingga, walaupun

⁸Affan Gaffar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 255

pada akhirnya desentralisasi harus dihadirkan, keberadaannya merupakan persenyawaan antara kepentingan dari pihak *state* dan *society*. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini, lebih didasarkan pada prinsip saling-ketergantungan dan saling membutuhkan. Sehingga, pada tataran yang lebih mikro, kesetaraan interaksi antara *state* dan *society* pun dapat tercipta, yakni antara pemerintah daerah dan komunitasnya.

Kecenderungan yang sebaliknya terjadi pada rezim otoriter. Ini karena, pada umumnya, dalam rezim otoriter sangat ditandai oleh dominasi *state*, baik pada proses pengambilan keputusan maupun pada tahap implementasi kebijakan. Peran *society* dalam proses pengambilan keputusan, pada khususnya, sangat dibatasi (untuk tidak menyebut disingkirkan). Dengan karakteristik seperti ini, maka dapat dimengerti bila kemudian pola interaksi antara *state* dan *society* dalam rezim otoriter lebih bersifat satu arah. Kalaupun terdapat dinamika dalam proses pengambilan keputusan, misalnya, namun hal tersebut lebih banyak diwarnai oleh kompetisi kepentingan, koalisi, kompromi, atau bahkan 'perselingkuhan' antarsegelintir elite di dalam negara (*state actors*). Dengan kata lain, bukan didasarkan atas interaksi kepentingan antara *state* dan *society*.

Desentralisasi, baik konsep maupun implementasinya, yang lahir dan dibidani oleh rezim otoriter, sulit dipungkiri, akan lebih banyak diinisiasi oleh pihak *state*, atau untuk lebih spesifiknya, oleh pemerintah pusat. Dominasi peran pemerintah pusat, dalam hal ini, tidak saja terjadi dalam proses perumusan kebijakan desentralisasi, tetapi juga dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan itu

sendiri. Sementara, pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Dalam konstelasi seperti ini, maka tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami oleh pemerintah daerah sebagai kewajiban, daripada sebagai hak.

Pada sisi lain, masyarakat (*society*) cenderung dipinggirkan, atau lebih diposisikan sebagai objek dari kebijakan desentralisasi. Dengan demikian, interaksi dua arah antara state dan society dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, praktis tidak terjadi. Dinamika dalam proses pengambilan keputusan lebih banyak ditandai oleh koalisi dan tawar-menawar kepentingan antarelite pemerintah daerah (*local-state actors*). Kalaupun kebijakan otonomi daerah harus diterapkan sebagai konsekuensi logis dari kebijakan, namun sejatinya ia lebih berkarakter.

Pada periode transisi menuju demokrasi, sifat dasar dari rezim otoriter seperti dikemukakan sebelumnya, belum secara total dapat dihilangkan. Kendati, salah satu tuntutan reformasi politik itu sendiri mengharuskan adanya perluasan peran society, namun dalam banyak hal, state relatif masih mendominasi proses pengambilan keputusan nasional atau bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, dapat memaksakan kehendaknya. Pada sisi lain, perselingkuhan antar *state actors* dalam rangka perjuangan kepentingan pribadi dan kelompok masih tetap berlangsung.

Diperbesarnya peluang bagi partisipasi masyarakat, sebagai bagian dari tuntutan reformasi politik, harus diakui, telah memberi nuansa baru bagi pola

interaksi antara *state* dan *society* pada periode transisi menuju demokrasi. Bila sebelumnya (pada periode rezim otoriter) pola interaksi antara *state* dan *society* cenderung satu arah, maka pada periode transisi menuju demokrasi mulai bergeser ke pola interaksi yang bersifat dua arah. Walaupun praktik dari pola interaksi dua arah tersebut cenderung tidak seimbang karena dalam banyak hal *state* masih dapat memaksakan kehendaknya atas *society*.

Selain itu, dan hal ini menjadi penting untuk dicatat, bahwa salah satu implikasi dari perluasan partisipasi masyarakat pada periode transisi menuju demokrasi adalah semakin transparannya kompetisi kepentingan antarelite massa. Kecenderungan ini tentunya mudah untuk dipahami, karena *society* dalam arti *civil society* itu sendiri belum siap untuk berperan. Maka dapat dimengerti bila kemudian peluang partisipasi masyarakat pada periode transisi menuju demokrasi telah lebih banyak ditangkap dan dimanfaatkan oleh para elite massa. Mereka inilah yang telah berperan mewakili masyarakat, atau mengklaim diri mewakili masyarakat, dalam berhadapan dengan pihak negara.

Secara umum sistem pemerintahan di Nepal dari Monarkhi Absolut ke Monarkhi Konstitusional hingga menjadi bentuk Republik adalah sebagai berikut :

Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi). Proses monarki konstitusional adalah sebagai berikut :

- a. Adakalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri

karena ia takut dikudeta. Contoh: negara Jepang dengan hak octrooi.

b. Adakalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contoh: Inggris yang melahirkan Bill of Rights tahun 1689, Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.

Bentuk Pemerintahan Republik

Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer.

1) Republik Absolut

Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidak berfungsi.

2) Republik Konstitusional

Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.

3) Republik Parlementer

Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

2. Teori Demokrasi Kebebasan Masyarakat (*Civil Liberties*)

Jaminan bahwa di dalam system demokrasi, kebebasan individual tidak akan dibatasi secara sewenang-wenang oleh Pemerintah. Kebebasan sipil biasanya terpaut dengan hak-hak manusia atau konstitusi yang mengurai secara rinci pembatasan khusus kewenangan aparat pemerintah. Hak kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berusaha serta keadilan hukum bagi mereka yang didakwa melakukan tindakan kejahatan.

Dalam zaman modern, Pemerintahan Demokratis telah meningkatkan tanggungjawab mengenai peran positif Pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak sipil individual dan kelompok dari tindakan sewenang-wenang pihak lainnya di dalam masyarakat. Perlindungan bagi kebebasan sipil untuk berbeda pendapat merupakan kunci penting dalam keyakinan demokrasi. Meski demikian tidak ada hak yang tanpa batas, semua pihak dibatasi oleh tuntutan hak dan kewajiban untuk melindungi serta memajukan kepentingan umum seluruh rakyat.⁹

Di dalam system demokrasi gangguan terhadap kebebasan individual tidak berarti harus ditindak dengan sewenang-wenang tetapi harus dipelakukan dengan layak dan adil, serta diajukan ke pengadilan dengan proses hukum. Barangkali masyarakat demokratis yang memberikan kebebasan bertanggungjawab dan selaras dengan tuntutan rakyat yang tertib dan teratur.

⁹ Plano, Jack. C, 1999, *International Relationship Dictionary*, Clon Press Ltd., London

Konsep dasar yang menyatakan bahwa pemerintahan demokrasi memiliki kekuasaan terbatas, memberikan peluang bagi aparat pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan tersebut dengan melaksanakan fungsi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembatasan utama konstitusionalisme tertuang dalam piagam undang undang dasar baik tertulis maupun lisan yang memberikan kekuasaan formal kepada pemerintahan yang diresmikan rakyatnya. Prinsip konstitusionalisme diterapkan ke dalam sistem kerja pemerintahan dan memberikan sebuah atribut dasar yang membedakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan absolute.

3. Teori Globalisasi

Perubahan bentuk/ sistem pemerintahan di Nepal juga terjadi karena globalisasi dunia, ada baiknya kita lihat mengenai teori tersebut.

- a. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti meliputi seluruh dunia. Ini berarti bahwa globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia.
- b. Globalisasi adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan diantara elemen-elemen yang terjadi akibat perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional.
- c. Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi

penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain.

- d. Globalisasi adalah proses meningkatnya saling keterkaitan antara berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, lingkungan, politik, dan pertukaran kebudayaan.
- e. Globalisasi adalah proses yang mencakup semua bidang seperti proses perubahan sosial, arus informasi, aliran barang, jasa dan uang, serta pertukaran kebudayaan.

1. Sejarah Globalisasi

- a. Fase pertama diawali ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar Negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Para pedagang Cina dan India mulai menelusuri negeri lain baik menggunakan jalan barat maupun jalan timur.
- b. Fase kedua ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang meliputi Jepang, China, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, Pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venezia, dan Genoa.
- c. Fase ketiga ditandai kebutuhan akan bahan baku industri yang mendorong eksplorasi besar-besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Hal ini didukung dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa dunia.

- d. Fase keempat ditandai dengan semakin berkembangnya industri dan kebutuhan bahan baku serta pasar yang kemudian mendorong berbagai perusahaan multinasional di Dunia
- e. Fase kelima ditandai ketika perang dingin berakhir dan komunisme Dunia runtuh. Hal ini seolah menjadi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan Dunia.

2. Pemikiran mengenai globalisasi

- a. Pandangan Pra Globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh Dunia berjalan. Pra Globalis dibagi 2 yaitu positif dan pesimis.
- b. Pandangan tradisional tidak percaya bahwa globalisasi akan terjadi. Mereka berpendapat bahwa globalisasi hanyalah mitos belaka. Menurut mereka yang sedang terjadi adalah kapitalisme internasional.
- c. Pandangan transformalis lebih cenderung menyatakan bahwa praglobalis terlalu melebih-lebihkan globalis namun tidak menyangkal adanya globalisasi.

3. Bentuk-bentuk globalisasi adalah :

- a. **Globalisasi ekonomi** dimana adanya tuntutan dunia yang berupa perdagangan internasional tanpa hambatan batas-batas negara. Globalisasi ekonomi menurut Tanri Abeng meliputi globalisasi

produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan

- b. **Globalisasi kebudayaan** dimana ciri-cirinya adalah berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional, penyebaran prinsip multi kebudayaan, berkembangnya industri pariwisata, banyaknya imigran dari suatu Negara ke Negara lain, berkembangnya mode yang berskala global, banyaknya event-event berskala global. Isu-isu global yang muncul dalam globalisasi adalah Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pelestarian Lingkungan Hidup, Pluralisme dan Pasar Bebas

Dalam suatu sistem politik, terdapat dua input yaitu tuntutan dan dukungan. Dalam kasus ini input yang berupa tuntutan yang datang dari dalam Negeri. Input input tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, tuntutan yang datang dari dalam negeri sendiri yaitu perjuangan rakyat Nepal untuk mengakhiri pemerintah Monarki Konstitusional. Perjuangan tersebut terutama dilakukan oleh NEIFIN (*The Nepal Federation of Indigenous Nationalities*) dan *Comunist Party of Nepal* (CPN)-Moist.

NEIFIN (*The Nepal Federation of Indigenous Nationalities*) adalah sebuah organisasi yang beranggotakan komunitas-komunitas asli Nepal. Organisasi ini adalah Organisasi payung berbentuk federasi dan berdiri pada tahun 1991. NEIFIN menjadi satu satunya organisasi yang diakui keabsahannya oleh Pemerintah. Secara umum cita-cita organisasi ini adalah

mendorong upaya pengakuan atas berbagai bentuk keragaman bahasa, agama dan budaya komunitas asli Nepal, dan membantu komunitas asli untuk memperjuangkan kebutuhan mereka secara berkelanjutan.

Partai Komunis Nepal (Maois) atau CPN (M) ialah sebuah parti politik berfahaman Maoisme di Nepal yang ditubuhkan pada tahun 1994 dan dipimpin Pushpa Kamal Dahal (atau lebih dikenali sebagai Prachanda). Parti ini menjadi parti terbesar di Pilihan Raya Dewan Perwakilan Rakyat Nepal 2008.

CPN (M) didirikan berikutan perpecahan dalam Parti Komunis Nepal (Pusat Perpaduan) dan memakai nama CPN (Pusat Perpaduan) sehingga tahun 1995. Pada 13 Februari 1996, CPN (M) melancarkan "Perang Rakyat Nepal", dan menguasai kawasan perkampungan di Negara sebelum mencapai gencatan senjata.

Menurut Stella Tamang, ada 5 persoalan besar yang diusung masyarakat adat dan didukung oleh CPN-Maoist, yakni:

1. Pembentukan negara sekuler, kesetaraan hak untuk bahasa, budaya, pendidikan, informasi dan pembangunan.
2. Restrukturisasi kekuasaan politik.
3. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan otonomi seluas-luasnya.
4. Affirmative action dibidang pendidikan, birokrasi dan kesehatan.
5. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dari perencanaan hingga pelaksanaan-nya, (Indigenous Affairs 1-2/04)

E. Hipotesa

Raja Nepal menggunakan kekuasaannya untuk mengambil kebijakan yang tidak mempedulikan nasib rakyat Nepal. Sistem kekuasaan Monarki Konstitusional yang di terapkan oleh Raja Gyanendra digunakan untuk mengambil alih seluruh kekuasaan politik. Hak-hak sipil dan politik rakyat kembali diberangus, sehingga muncul partai-partai yang menginginkan sebuah perubahan dengan cara menganti sistem Monarki Konstitusional ke sistem Republik.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah jenis penelitian dengan teknik analisa deskriptif, yaitu akan menguraikan dan mengulas seputar bagaimana terjadinya proses pergantian sistem politik di Nepal dari bentuk pemerintahan Monarkhi Konstitusional ke bentuk Republik.

Penelitian ini lebih banyak didukung oleh literasi kepustakaan dalam teknik pengumpulan datanya yang berkaitan dengan judul penelitian, sehingga eksplorasi data bersifat studi kepustakaan (*libary research*). Oleh karena itu, pengumpulan data akan dilakukan melalui kajian literasi seperti media pustaka, majalah, surat kabar, jurnal dan sumber-sumber data lainnya. Sedangkan untuk mendapatkan data *up to date*, akan banyak didukung melalui persediaan data yang ada di internet maupun sumber lain yang diyakini masih mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang dikaji.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada proses Pokok permasalahan yaitu: Bagaimana terjadinya proses perubahan sistem politik di Nepal dari bentuk pemerintahan Monarkhi Konstitusional ke bentuk Republik.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini secara keseluruhan disusun berdasarkan per bab yang selanjutnya akan dibagi ke dalam su-sub bab. Hal ini yang dimaksudkan untuk membedakan jenis masalah dalam pembagian bab-babnya. Sedangkan dalam sub-nya dimasukkan untuk menguraikan isi dari tiap-tiap bab secara terperinci, sehingga diharapkan akan memperoleh suatu permasalahan secara menyeluruh.

Secara mendasar bahwa tulisan ini mengusung lima bab, antara lain:

- BAB I. Pendahuluan, meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, Tatar belakang masalah, perumusan masalah, hipotesa, kerangka konseptual, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II. Pada Bab ini akan mengulas tentang profil Negara dan sejarah Nepal, kondisi sosial politik dan sosial ekonomi.
- BAB III. Mengulas tentang masa pemerintahan Monarkhi Absolut dan Monarkhi Konstitusional di Nepal.
- BAB IV. Mengulas perubahan sistem Pemerintahan Nepal yang terdiri dari pemberontakan maoist, pembubaran Parlemen Loktantra Andolan,

pembatalan Monarkhi dan pembentukan Republik Federal dan pemilu Nepal.

BAB V. Pada bab ini penulis mencoba merangkai benang merah dari penjelasan bab-bab diatas, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, yakni bagaimana pergerakan rakyat dan partai politik sehingga terjadi proses pergantian sistem politik di Nepal dari Monarkhi ke Republik?